

BAB IV

POSISI NEGARA DALAM MENDORONG KOREA SELATAN MENJADI NEGARA INDUSTRI BARU

Program-program dan kebijakan yang dilancarkan oleh Presiden Korea Selatan ke-3, Park Chung Hee terbukti berhasil memperbaiki situasi negara dan terutama perekonomian negara ginseng tersebut. Akan tetapi, usaha yang dipimpin oleh Park Chung Hee sepanjang periodenya tidaklah selalu berjalan mulus. Hambatan internal pun mulai muncul dikarenakan keotoriteran Presiden Park. Namun, disitulah awal munculnya peran negara yang diciptakan oleh Park Chung Hee untuk mengembangkan negara Korea Selatan. Dibantu dengan kekuatan militer sebagai faktor pendukung dalam pembangunan ekonomi, Korea Selatan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mulai mengenalkan dirinya ke dunia internasional. Berawal dari fondasi kokoh yang dimulai pada era pemerintahan Park Chung Hee, kini Korea Selatan pun menjadi salah satu negara maju yang diakui secara internasional. Kesuksesan Korea Selatan yang terus berkembang seiring berjalannya telah menjadi rahasia umum bagi masyarakat internasional.

1. Tumbuhnya Rezim Otoriter di Bawah Pemerintahan Park Chung Hee

Latar belakang Park Chung Hee dinilai cukup berbeda dari presiden-presiden sebelumnya dan menjadi salah satu faktor munculnya sikap otoriter

seorang Park Chung Hee. Presiden Park lahir dan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Hal tersebut mempengaruhi jalan pikirannya terhadap beberapa revolusi yang ia canangkan. Jika sebelumnya negara dipimpin oleh kelas tertentu saja, Park menginginkan adanya perubahan bagi sistem tersebut. Park menekankan bahwa modernisasi dan kepuasan ekonomi bukanlah hak salah satu kelas semata, tetapi hak setiap warga negara(Kusumadewi 2013).

Pada awalnya Korea Utara terbukti lebih unggul daripada Korea Selatan, terutama dikarenakan lebih banyaknya sumber daya alam yang berada di Korea Utara pada saat itu. Akan tetapi, pada saat pemerintahan Park Chung Hee berlangsung, konfusianisme memiliki andil dalam kemajuan yang dialami Korea Selatan(Shafira 2014). Konfusianisme disini lebih menekankan pada disiplin diri, pendidikan, ikatan keluarga dan harmoni sosial yang kuat. Oleh sebab itu konfusianisme dalam sistem kekuasaan cenderung berdasarkan kekeluargaan dan bersifat anti-demokrasi(Tandirerung 2012). Salah satu bentuk konfusianisme pada era Park Chung Hee ialah Presiden Park menggunakan asas kekeluargaan terhadap para pengusaha oleh pemerintah. Adanya hubungan timbal balik dimana pemerintah melindungi para *chaebol* dalam rangka meningkatkan perekonomian melalui industri dalam negeri. Hubungan timbal balik disini dapat berarti hubungan kepercayaan, kekeluargaan dan kerjasama. Hal tersebutlah yang menyebabkan paham konfusianisme dibawah Presiden Park mampu memajukan perekonomian Korea Selatan karena adanya asas kekeluargaan dan kepercayaan dari pengusaha terhadap pemerintah sehingga pemerintah memiliki kontrol atas para pengusaha atau *chaebol*.(Kepakisan 2016).

Tidak hanya asas kekeluargaan yang termuat dalam konfusianisme pada era Presiden Park, ketegasan serta kecekatan juga menjadi salah satu nilai yang muncul pada konfusianisme era Presiden Park. Corak konfusianisme tergambar dalam ide-ide politiknya yang dituangkan melalui beberapa tulisannya. Berikut adalah tiga buah tulisan Presiden Park yang juga mencerminkan sikap tegas, bertanggung jawab, terpercaya dan juga kecekatan (Kusumadewi 2013).

1. Pada buku *Chidojado (The Ways of a Leader)*. Park mengemukakan bahwa ia percaya bahwa kualifikasi untuk seorang pemimpin haruslah sadar akan persahabatan, kemampuan untuk menilai dan memecahkan masalah, visioner, berdedikasi terhadap prinsip atau memiliki karakter yang hati-hati, tegas, teguh pendirian, tulus dan bersemangat, serta terpercaya.
2. Pada buku *Uri Minjokui Nagal Kil (The Path of Our Nation)*. Disini Park menghimbau kesadaran terhadap “musuh yang berada di dalam dan di luar”. “Musuh” dalam hal ini lebih menyoroti kepada paham komunisme dan kelemahan internal bangsa Korea. Dalam rangka menghadapi musuh tersebut, diperlukan adanya kebangkitan nasional yang mengarah kepada eliminasi karakter negatif nasional. Menyadari hal tersebut, Presiden Park menegaskan perlunya sebuah reformasi.
3. Pada buku *Gukkawa Hyeokmyeonggwa Na (The country, the revolution and I)*. Park disini menekankan kembali perlunya revolusi untuk membawa kekuatan baru di masa depan. Revolusi

tersebut lebih berfokus pada pembentukan generasi baru untuk mengambil alih negeri. Dengan kata lain, regenerasi bangsa. (Kusumadewi 2013)

Dapat dilihat dari ketiga tulisan Park Chung Hee tersebut mencerminkan tingkat kedisiplinan dan dibutuhkan ketegasan untuk merealisasikan hal tersebut. Selain itu dalam merealisasikan hal tersebut dilancarkan melalui konsep hierarki dan sistem otoriter-birokratis di dalam konfusianisme dapat dijalankan beriringan dengan cara kerja militer yang terorganisir dan cenderung bersifat *top-to-bottom* (Kusumadewi 2013).

Asas kekeluargaan yang telah dicanangkan oleh Presiden Park pada awal mulai dianggap memudar dikarenakan sikap otoriternya yang mulai muncul. Salah satu bentuk nyata dari tindakan otoriter yang dilakukan pada jaman pemerintahan Park Chung Hee adalah dengan disahkannya Konstitusi Yushin. Konstitusi ini dimaksudkan untuk mengukuhkan kediktatoran Park Chung Hee. Melalui sistem tersebut, presiden dipilih secara tidak langsung oleh Dewan Unifikasi Nasional yang dibentuk secara manipulatif dan khusus bertugas untuk memilih presiden. Otoriterianisme Park Chung Hee mendapat dukungan dari kalangan birokrasi. Konstitusi ini awalnya dilaksanakan untuk mengamankan negara dari demonstrasi. Presiden Park dengan dukungan militer mengumumkan negara dalam keadaan darurat perang, membubarkan Majelis Nasional, menutup universitas yang menjadi basis demonstrasi, dan melarang semua kegiatan politik. Pada Oktober 1972, Presiden Park mengeluarkan dekrit presiden yang kemudian dikenal sebagai konstitusi Yushin (Darini 2009).

Konstitusi Yushin disini cukup mengubah banyak hal. Dengan diberlakukannya Konstitusi Yushin, presiden menguasai administratif, legislatif, dan yudikatif sudah menyediakan landasan bagi periode kepemimpinan yang panjang. Pemerintah yang memegang kekuasaan dengan legalitas Konstitusi Yushin dapat mengawasi dan menekan kehidupan masyarakat sehari-hari dengan berlandaskan alasan kestabilan sosial.

Pada saat itu, pemerintah bahkan membatasi kegiatan budaya populer yang bebas untuk menegakkan prinsip-prinsip sosial. Seperti contohnya adalah budaya para pemuda pada saat itu muncul di sekitar perguruan tinggi. Salah satunya ialah celana jeans yang menjadi simbol darah muda, serta penampilan pria yang memegang gitar dan berambut panjang menjadi lambang seorang pemuda yang mengikuti trend pada saat itu. Berdasarkan dengan adanya Konstitusi Yushin, sekitar 12.870 orang di Korea Selatan ditangkap karena rambut panjang pada tahun 1973, sehingga mereka dipaksa untuk memotong rambutnya.

Sementara bagi kaum wanita muda, rok mini menjadi sangat populer pada masa itu. Para polisi bahkan membatasi penggunaan rok mini dan menetapkan panjang rok tertentu dengan membawa mistar bambu dan gunting. Panjang rok yang melebihi 20cm diatas lutut akan dikenakan sanksi sebagai tindakan kriminal ringan yang dapat merusak moral masyarakat. Bahkan pada tahun 1970-an para penyanyi muda berusia sekitar 20 tahun-an mulai muncul dan melantunkan lagu yang menceritakan kebebasan, semangat, cinta, dll sambil bermain gitar sebagai hiburan para kalangan muda pada saat itu. Akan tetapi, pemerintah juga melarang untuk menyanyikan sejumlah lagu penyanyi muda dengan alasan lirik lagu yang

dapat menimbulkan ketidakstabilan sosian, keputusasaan dan tidak bermoral. Jeans, rambut panjang, rok mini dan beberapa lagu kalangan muda mendapatkan kritikan karena dikhawatirkan anak dalam negeri yang mulai mengejar budaya dunia Barat(KBS World Radio 2015).

Sikap otoriter yang dibawa oleh Park Chung Hee menimbulkan adanya beberapa konflik internal. Keotoriteran Park Chung Hee tersebut menimbulkan pandangan negatif pada lawan politiknya dan juga memunculkan perselisihan dengan Kepala Intelijen Korea Selatan pada saat itu, yaitu Kim Jea Kyu (Arungbudoyo 2015). Masyarakat Korea Selatan pun mengecap Park Chung Hee adalah pribadi yang otoriter.

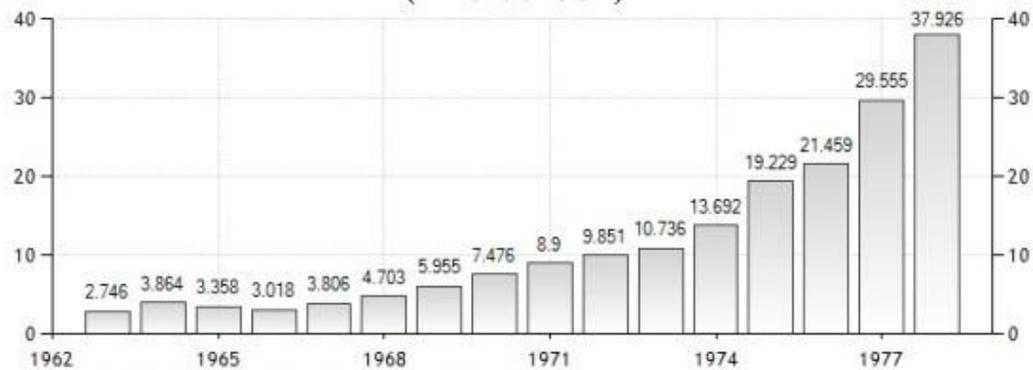
Akan tetapi menurut Sarwo Edhie yang telah menjadi Duta Besar di Korea Selatan selama 4 tahun mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa salah satu kunci kesuksesan Presiden Park adalah dengan memanfaatkan kaum teknokrat untuk memperkuat pemerintahannya. Mungkin benar adanya bahwa Presiden Park adalah seorang otoriter dikarenakan ia melakukan perubahan konstitusi pada tahun 1972 yang dikenal dengan konstitusi Yushin agar ia dibolehkan lagi mengikuti pemilihan presiden. Akan tetapi menurut Sarwo Edhie, Presiden Park adalah pribadi yang bersih. Park Chung Hee adalah pekerja keras dan hidup sederhana serta mencintai produk lokal. Presiden Park juga dikenal bersih dari korupsi(Munif 2007). Oleh sebab itu, terkadang sikap otoriter diperlukan bagi seorang pemimpin jika sikap otoriter tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Otoriter akan berhasil dengan baik jika pemimpinnya dapat memberikan contoh yang sama persis dengan apa yang ia perintahkan(Siregar 2015). Dan

Presiden Park telah terbukti melakukannya seperti yang diulas dalam praktik program-programnya seperti *Saemaul Undong*, *Five Years Economic Development Plan*, dll.

Pribadi beliau yang terkenal otoriter juga mempengaruhi jalannya pemerintahan Park selama kurang lebih 18 tahun. Park Chung Hee bisa jadi dikenal sebagai sosok yang otoriter akan tetapi di sisi lain Presiden Park juga merupakan sosok pemimpin yang telah berhasil membidani lahirnya sebuah periode ekonomi yang sangat pesat di Korea Selatan yang kemudian menjadi awal kebangkitan kemajuan bangsa Korea Selatan setelahnya (Winardi 2015). Bukti keberhasilan era Park Chung Hee salah satunya adalah dengan peningkatan pesat GDP Korea Selatan. Walaupun beliau dianggap otoriter dikarenakan konstitusi Yushin yang dibuat pada tahun 1972, akan tetapi mulai pada tahun tersebut lah GDP Korea Selatan mulai mengalami peningkatan pesat.

Tabel 4.1

Figure 1. The GDP of South Korea During the Era of Park Chung-Hee (Billions of USD)



(Muhammad, Park Chung Hee and The Economy of South Korea 2012)

Cara Park Chung Hee dalam meningkatkan perekonomian negara tidak lain salah satu faktornya adalah sikap otoriternya dalam menjalankan pemerintahannya. Hal tersebut justru membuktikan bahwa peran negara di Korea Selatan pada era Park Chung Hee sangatlah penting. Peran negara sendiri dalam pembangunan dimanifestasikan dalam apa yang sering disebut sebagai *plan-ned-rational development strategy* yang juga dapat diterjemahkan sebagai tindakan-tindakan dan kebijakan ekonomi seperti pengadopsian industrialisasi berorientasi ke luar (*out-ward looking*), aktif dalam menarik kapital luar negeri, berbagai reformasi institusi, dan memaksimalkan pertumbuhan.

Hal tersebut terjadi di Korea Selatan sewaktu kudeta terjadi pada pemerintahan Syngman Rhee dan di kemudian waktu pemerintahan Korea Selatan diambil alih oleh Park Chung Hee. Tujuan utama dari pemerintahan Presiden Park adalah menghapuskan ketimpangan di sisi ekspor. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan fasilitas bea masuk atas impor barang yang dilakukan oleh para eksportir, serta memberikan fasilitas kredit bersubsidi bagi para eksportir. Atas hal dasar ini, nilai subsidi netto atas ekspor pada tahun 1960-an dan awal 1970-an diperkirakan sebesar 8,2% terhadap nilai ekspor keseluruhan, dan hal tersebut adalah lebih dari cukup untuk mengimbangi diskriminasi yang terkandung pada rejim sebelumnya (Winarno 2009).

Korea Selatan adalah salah satu negara yang berhasil mencapai kemajuan ekonomi melalui *state developmental* dimana negara memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan yang diharapkan dapat mengawasi struktur, tingkah laku dan kinerja pelaku usaha. Tentu dengan atas ijin dari pemerintah terlebih dahulu (Won

2016). Kebijakan-kebijakan pada era Park Chung Hee seperti kebijakan *heavy chemical industry* (HCI) dan kebijakan *export-oriented industrilization* (EOI) telah terbukti meningkatkan perekonomian negara seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Serta program-program yang diusung oleh Park Chung Hee pun seperti *Saemaul Undong*, *Economic Planning Board* (EPB), dan *Five Years Economic Development Plan* (Repelita), juga terbukti membawa peningkatan terhadap perekonomian negara. Akan tetapi negara yang memakai *state developmental* ini sendiri memiliki resiko seperti adanya pemerintahan yang kurang adil. Karena ketika negara campur tangan terhadap pasar, maka bahaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) selalu mengancam. Hal tersebut dapat di minimalisir dengan *market-friendly* dimana negara melakukan investasi sumber yang tepat seperti membangun suasana yang kompetitif bagi perusahaan swasta, menjamin keterbukaan ekonomi untuk perdagangan internasional, dan mempromosikan stabilitas makroekonomi(Won 2016). Presiden Park juga telah melaksanakan hal tersebut sehingga resiko yang ditakutkan dapat di minimalisir. Terlebih lagi, Presiden Park menganut asas kekeluargaan dengan para *chaebol* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga resiko-resiko tersebut tidak nampak pada era pemerintahan Park Chung Hee.

Kebijakan-kebijakan serta program-program pada era pemerintahan Park Chung Hee dinilai telah menggambarkan definisi dari pentingnya peran negara seperti memaksimalkan pertumbuhan, yang telah diulas dalam sebuah buku karya Budi Winarno. Bahkan menurut Arief Budiman seorang doktor sosiologi, Korea Selatan menggunakan keotoriteran negara untuk menumbuhkan kelompok

wiraswasta yang tangguh, agar roda pembangunan ekonominya bisa terus berputar(Won 2016).

2. Posisi Strategis Militer dalam Pembangunan Ekonomi

Tidak hanya beberapa program yang berfokus pada industri saja yang membuat pemerintahan pada era Park Chung Hee ini dinyatakan berhasil. Berdasarkan latar belakang Park Chung Hee sendiri, baik dari segi keluarga maupun pendidikan serta karir yang menjadi salah satu faktor munculnya sifat otoriter pada saat pemerintahannya, militer juga menjadi salah satu alasan mengapa perekonomian serta pembangunan Korea Selatan pada saat itu meningkat secara drastis.

Karir militer Park Chung Hee sebelum menjabat menjadi presiden ketiga Korea Selatan juga tergolong sangat lancar. Dalam masa pembelajarannya di akademi, timbul suatu pemikiran di benak Park. Park percaya bahwa dengan memiliki armada militer yang kuat dapat membawa Korea Selatan pada kemerdekaan dan kedaulatannya sebagai bangsa yang kuat. Hal tersebut dikutip pula pada puisi yang ditulis Park Chung Hee yang prihatin melihat keadaan bangsanya yang lemah. Park juga berfikir bahwa hal yang membuat Korea kalah dari Jepang pada saat penjajahan Jepang di Korea adalah karena penduduk Korea yang masih sangat acuh pada sekitarnya dan armada militer yang masih lemah (Ayu 2011). Hal-hal tersebut lah yang membuat semangat dan tekad Park Chung Hee dalam mengenyam pendidikan di bidang militer

semakin membara dan juga berpengaruh pada Park Chung Hee dalam menjabat menjadi presiden Korea Selatan.

Tidak dapat dipungkiri pula bahwa militer merupakan salah satu faktor yang penting dalam mengamankan negara. Terlebih lagi mengingat posisi Korea Selatan yang rawan untuk munculnya konflik dengan negara tetangga, Korea Utara. Oleh karena itu, selama Korea Selatan berada di bawah pimpinan Park Chung Hee, pemerintahan Korea Selatan bertumpu pada kekuatan yang berasal dari militer, birokrat dan teknokrat. Rezim Korea Selatan di bawah pimpinan Park Chung Hee disebut Rezim Otoriter Biroktaris. Presiden Park Chung Hee juga termasuk salah seorang peletak dasar *strong military-dominated government* di Asia (Darini 2009).

Menjelang terpilihnya Park Chung Hee sebagai presiden Korea Selatan, Presiden Park mendeklarasikan UU Militer sebagai tahap awal yang ia ambil dan selanjutnya ia pun terpilih menjadi presiden Korea Selatan pada tahun 1961. Komite Revolusioner juga langsung didirikan beserta dengan Dewan Tinggi Rekonstruksi Nasional untuk melatih kekuatan legislatif dan administratif pemerintahan pada saat itu (Ayu 2011). Pada tahun yang sama, dibawah pimpinan Park Chung Hee, Korea Selatan pun melaksanakan Revolusi Militer. Beberapa perubahan pun terjadi, salah satunya adalah dicabutnya UU Otonomi Daerah yang telah dimulai pada tahun 1951, akan tetapi UU tersebut dicabut dengan alasan adanya kekacauan sosial. UU tersebut kembali di gunakan pada tahun 1992 karena adanya tuntutan demokrasi (Carol J. Pierce Colfer, Ganga Ram Dahal, Doris Capistrano 2009).

Pada tanggal 10 Juni 1961, Korea Selatan juga mendirikan badan intelijen dengan nama *Korean Central Intelligence Agency* (KCIA) yang bertujuan untuk melindungi rakyat, menjamin keamanan nasional, dan mendorong tercapainya kepentingan nasional. Akan tetapi pada Januari 1981, KCIA berubah nama menjadi *National Security Planning Agency* (NSPA)(Badan Intelijen Negara 2013).

Pemerintah model Park Chung Hee ini lebih dikenal dengan istilah *Administrative Democracy*. Hal tersebut lebih menekankan pada tujuan pembangunan negaranya pada beberapa hal, yaitu seperti pemberantasan korupsi, memperkuat kemampuan mandiri masyarakat dan membangun keadilan sosial. Dalam program pembangunan ekonominya, Presiden Park lebih menitikberatkan pembangunan ekonomi dalam bidang industri dengan adanya intervensi negara yang kuat(Adawiyah 2013). Namun, tidak semua kebijakan dan rencana Park Chung Hee berjalan lancar. Hal ini dikarenakan oleh adanya beberapa bentuk kebijakan yang dianggap radikal karena lebih memasukkan campur tangan pihak asing dalam perekonomian negara. Hal tersebut ditambah lagi dengan bentuk kepemimpinan Park Chung Hee yang semakin lama semakin merujuk pada kediktatoran. Terutama dengan pembatasan media massa dalam menyapaikan informasi dan juga hukuman berat bagi siapapun yang menentangnya (Ayu 2011).

3. Integrasi Korea Selatan dengan Dunia Internasional

Disamping segala kediktatoran dan sikap otoriter selama Park Chung Hee menjabat, akan tetapi presiden Park juga mulai perlahan-lahan membuka hubungan Korea Selatan terhadap dunia internasional. Dengan fokusnya dalam mengembangkan sektor industri, maka ada beberapa hal yang perlu Park upayakan untuk mendukung hal tersebut. Salah satunya adalah dengan aliran masuk FDI (*FDI inflow*) yang masuk pertama kali pada tahun 1962, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Park. *FDI inflow* itu sendiri adalah strategi pembangunan pemerintah berdasarkan pinjaman luar negeri, terutama dari Amerika Serikat, Jepang dan Inggris (Kristiyanti 2013).

Hubungan yang dekat antara Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang bukan lain adalah dikarenakan oleh faktor *history*, yaitu dimulai pada saat Era Perang Dingin. Jika di zona Eropa, Amerika Serikat berusaha menyebarkan pengaruhnya dengan cara memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara di wilayah Eropa Barat dengan program terkenal bernama *Marshall Plan*. Maka di wilayah Asia, Amerika Serikat berusaha memegang Jepang dan Korea Selatan untuk masuk ke dalam zona negara-negara penganut ideologi demokrasi-kapitalis. Oleh karena itu, tak heran bahwa bantuan untuk pembangunan Korea Selatan dari Amerika Serikat terhitung begitu lancar. Pembangunan Ekonomi yang dirancang Presiden Park pun lebih banyak mengadopsi dari negara Jepang, hal tersebut dikarenakan kedua negara hendak dijadikan sebagai sekutu dekat Amerika Serikat di wilayah Asia Timur. Bahkan menurut professor Elaine Kim selaku salah seorang intelektual wanita

Asia-Amerika di *University of California, Barkeley*, beliau mengatakan bahwa dalam skala makro ekonomi, bantuan keuangan Amerika Serikat kepada Korea Selatan merupakan salah satu faktor timbulnya fenomena terkenal yaitu “*South Korean Economic Miracle*” (Makdori 0215).

Akan tetapi, dengan hubungan yang terjalin baik antara Korea Selatan dengan beberapa negara-negara besar yang ada di dunia dapat menjadi peluang bagi Korea Selatan dalam menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara lain dan juga sebagai jembatan bagi Korea Selatan dalam mengenal beberapa organisasi internasional yang ada. Selain itu dasar-dasar kokoh yang telah dibentuk oleh Presiden Park terbukti mampu mengembangkan perekonomian Korea Selatan. Contohnya yaitu pada saat setelah Presiden Park tewas terbunuh karena tertembak pada tahun 1979 oleh direktur KCIA atau Kepala Intelijen Korea Selatan pada saat itu, yaitu Kim Jea Kyu, Korea Selatan akhirnya berubah menjadi republik presidensial pada tahun 1987. FDI yang telah dimulai pada era Park Chung Hee pun terus dikembangkan dan berhasil memulai strategi pembangunan ekonomi yang baru dengan menekan lebih banyak aliran masuk FDI daripada pinjaman luar negeri. Strategi tersebut dinilai berhasil dan FDI telah tumbuh berkembang menjadi lebih baik. Investor pun dapat dengan mudah melihat apakah perusahaannya dapat berinvestasi di Korea Selatan dengan baik atau tidak (Kristiyanti 2013).

Hubungan Korea Selatan yang baik dengan beberapa negara tetangga juga mengakibatkan munculnya peran Korea Selatan dalam beberapa organisasi

internasional. Korea Selatan menjadi satu dari anggota pertama APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*). Organisasi tersebut bekerja untuk penghapusan dan liberalisasi tarif dan membangun area perdagangan bebas di kawasan Samudera Pasifik. Hal ini juga mendukung adanya FDI di Korea Selatan menjadi lebih terliberalisasi. Selain itu, Korea Selatan juga menjadi anggota pendiri GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) pada tahun 1994. Pada tahun 1995 Korea Selatan pun bergabung dengan WTO (*World Trade Organization*) dan menjadi anggota OECD pada tahun 1996. Pada wilayah Asia Tenggara, Korea Selatan pun menjalin hubungan yang cukup baik dengan bukti adanya peningkatan ekonomi Korea Selatan dengan ASEAN, yaitu dengan dibentuknya ASEAN+3. ASEAN+3 terbentuk pada saat krisis ekonomi 1997 di kawasan Asia, dan negara-negara ASEAN telah menunjukkan ketidakmampuannya untuk mengatasi krisis tersebut. Situasi itu memicu mereka untuk berpaling kepada negara-negara tetangga terdekatnya di kawasan Asia Timur, yaitu Jepang, China dan Korea Selatan. Dan pada faktanya, hal ini mendorong terbentuknya kerjasama diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur melalui forum ASEAN+3. Korea Selatan juga menunjukkan partisipasinya dalam membangun hubungan baik dengan negara-negara di Asia, yaitu dengan bergabungnya Korea Selatan dalam ARF (*Asean Regional Forum*). Negara-negara yang ikut berpartisipasi dalam forum ini bukan hanya anggota-anggota ASEAN, melainkan terdapat pula negara-negara lain seperti Australia, Kanada, China, Uni Eropa, India,

Jepang, Korea Utara, Mongolia, Selandia Baru, Pakistan, Rusia, dan Amerika Serikat (Kristiyanti 2013).

Keikutsertaan Korea Selatan dalam organisasi internasional pun terus berkembang seiring berjalannya waktu. Tidak hanya organisasi internasional saja, nama Korea Selatan semakin meluas di dunia internasional dikarenakan Korea Selatan aktif berusaha untuk memperluas perdagangannya dan membentuk kerjasama secara luas dengan wilayah ekonomi yang sedang berkembang, seperti BRICs, ASEAN, Amerika Latin, dan lain sebagainya(Kristiyanti 2013).

Dalam rangka mendukung perindustrian Korea Selatan yang sedang maju-majunya, Korea Selatan juga membutuhkan dorongan berupa tenaga kerja asing yang baik pula. Oleh karena itu, memasok tenaga kerja asing, khususnya TKI, merupakan salah satu jalan bagi Korea Selatan untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan negara-negara lain. Tidak terkecuali Indonesia yang sudah menjalin hubungan kerjasama tenaga kerja asing dengan pihak Korea Selatan. Bahkan Indonesia cukup dikenal sebagai salah satu negara pemasok tenaga kerja ke luar negeri terbesar. Korea Selatan merupakan salah satu negara yang tercatat sebagai konsumen tetap tenaga kerja asing yang khususnya berasal dari Indonesia. Hal ini pun tentu mendorong adanya kerjasama bilateral yang prospektif antara Korea Selatan dengan Indonesia, terkhususkan dalam hal pengiriman tenaga kerja.

Kerjasama antara Korea Selatan dengan Indonesia dalam hal ini pun telah lama diatur dalam suatu kontrak perjanjian berupa *Memorandum of Understanding* (MOU) sejak tahun 2004, yang juga sebelumnya telah dimulai pertama kali melalui *Industrial Training Program* pada tahun 1994. Menurut pendapat beberapa TKI asal Indonesia pun, setidaknya menurut pengetahuan mereka, perlakuan Korea Selatan terhadap para TKI lebih baik dari pada Arab Saudi dan Malaysia (Adriyani 2015).

4. Transformasi Korea Selatan menjadi Negara Industri Baru di Asia

Industri dijadikan sebagai fokus utama pada saat pemerintahan era Park Chung Hee berlangsung. Hal tersebut membuahkan hal-hal positif yang berguna bagi peningkatan perekonomian Korea Selatan. Park Chung Hee berhasil membangun pondasi kokoh terhadap perindustrian di negara ginseng tersebut. Hal tersebut terbukti dengan perkembangan Korea Selatan yang semakin tahun semakin berkembang, terkhususkan pada bidang industri. Kini industri Korea Selatan pun sudah menjadi salah satu industri terkenal di dunia.

Dalam 50 tahun terakhir, Korea Selatan telah menjadi model bagi negara-negara berkembang. Dengan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, hal tersebut memungkinkan Korea Selatan menjadi negara terbesar ke-8 dalam hal perdagangan dunia. Walau akhir-akhir ini Korea Selatan tengah mengalami sedikit kegoyahan dengan pertumbuhan PDB rata-rata 3,6% selama sepuluh tahun terakhir. Angka tersebut merupakan angka penurunan yang cukup

signifikan dari tingkat pertumbuhan tahunan 8,1% yang berlaku pada 1965-2005. OECD juga telah memproyeksikan penurunan lebih lanjut menjadi sekitar 2,5% pada dekade mendatang(Wha 2015).

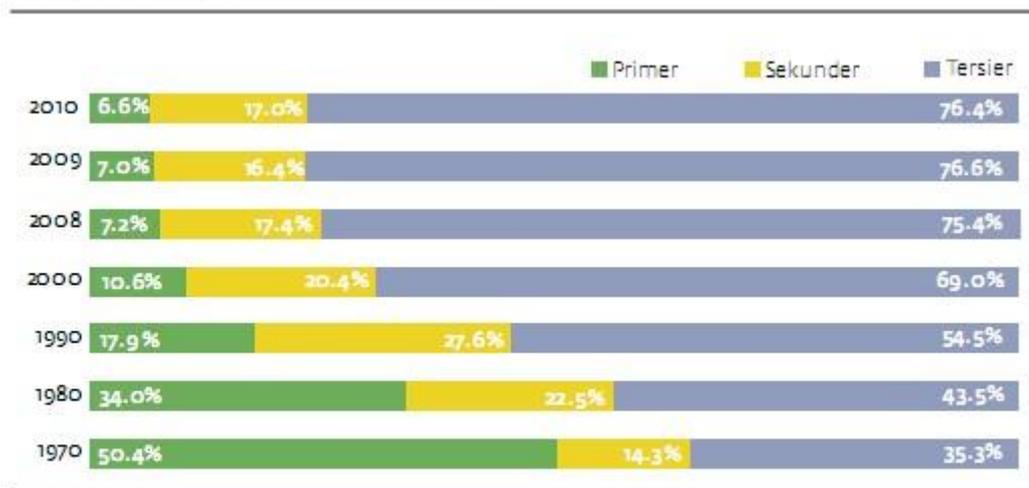
Akan tetapi Park Geun Hye yang kini menjabat sebagai presiden Korea Selatan ke-18, dan tak lain adalah anak dari Park Chung Hee telah mengumumkan untuk memajukan rencana negara pada fokus 'ekonomi kreatif'. Rencana tersebut bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan baru berdasarkan inovasi dan kewirausahaan (Kohen 2015). Oleh sebab itu, dewasa ini Korea Selatan pun semakin giat untuk mengukir prestasi-prestasi baru.

Berawal dari industrialisasi yang Park Chung Hee lakukan, hal tersebut terbukti mampu memberikan kemajuan pula pada sektor lainnya. Dimulai pada segi ketenagakerjaan yang menjadi salah satu faktor utama pendukung pergerakan industri di Korea Selatan itu sendiri. Ketenagakerjaan di Korea Selatan pun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dimulai dari keotoriteran pada era Park Chung Hee dalam pelaksanaan beberapa programnya yang juga membuahkan hasil manis, kini masyarakat Korea Selatan pun mengalami peningkatan dalam hal ketenagakerjaan yang menjadikan industri di Korea Selatan kian maju. Pada era Park Chung Hee tahun 1963, pekerja di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan berjumlah sebesar 63% dari total angkatan kerja. Namun angka tersebut menurun menjadi 6,6% pada tahun 2010. Akan tetapi sebaliknya, pangsa industri tersier (sektor jasa) meningkat dari 28,3% dari orang yang bekerja di tahun

1963 menjadi 76,4% di tahun 2010(Layanan Informasi dan Kebudayaan Korea 2012).

Tabel 4.2

Komposisi Pekerjaan Berdasarkan Industri



Sumber: Statistik Korea

Catatan: Istilah "Primer" mengacu pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; "Sekunder" pada sektor pertambangan dan manufaktur; dan "Tersier" pada Modal Overhead Sosial (Social Overhead Capital/SOC) dan sektor jasa lainnya.

(Layanan Informasi dan Kebudayaan Korea 2012)

Perkembangan yang terlihat pada sektor ketenagakerjaan cukup terlihat jelas terutama dalam sektor industri sehingga mempengaruhi perkembangan perekonomian negara. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai dampak dari adanya modernisasi yang diciptakan oleh Park Chung Hee. Dampak tersebut disebut *Trickle Down Effect* atau pemerataan dengan metode 'menetes ke bawah', dimana yang berarti bahwa sebuah pertumbuhan akan berdampak pada kemakmuran sebuah negara(Astrifani 2012).

Bahkan muncul sebutan '*The Miracle of Han River*' atau 'Keajaiban Sungai Han' pada masa pemerintahan Park Chung Hee yang mengacu pada

pesatnya pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang secara ajaib telah mengubah Korea Selatan dari puing-puing perang Korea di masa silam. Selepas masa pemerintahan Park Chung Hee, perekonomian Korea Selatan terus mengalami perbaikan dan perkembangan. Bahkan pada tahun 2010, perekonomian Korea mencatat tingkat pertumbuhan sebesar 6,2%. Angka tersebut merupakan angka tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Pendapatan per kapita pun kembali ke tingkat US\$ 20.000. Ekspor pun meningkat sejalan dengan kenaikan permintaan luar negeri di tengah pemulihan ekonomi global dan didukung oleh peningkatan daya saing produk Korea. Korea Selatan bahkan telah melonjak menjadi negara pengekspor nomor 7 di dunia, dan mencapai surplus perdagangan lebih dari US\$ 40 milyar untuk dua tahun berturut-turut.

Tabel 4.3

Pertumbuhan PDB / Pendapatan Nasional Bruto Per Kapita



Sumber: Bank Korea
(Layanan Informasi dan Kebudayaan Korea 2012)

Kemajuan atau seluruh perkembangan tersebut bukan lain karena para *chaebol* yang juga mulai meningkatkan kinerjanya. Salah satu industri yang menjadi keunggulan di Korea Selatan adalah industri otomotifnya. Bahkan pada saat pemerintahan Park Chung Hee yang memiliki visi untuk menjadikan Korea Selatan sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia, industri otomobil pada saat itu sudah mulai dibangun. Saat mulai memimpin pemerintahannya pada tahun 1960-an, Park memutuskan bahwa negaranya akan menjadi salah satu produsen otomobil dunia. Presiden Park pada saat itu beranggapan bahwa kontribusi industri ini dalam proses pembangunan, akan mampu menjadi katalisator bagi peningkatan status ekonomi Korea Selatan dari negara berkembang menjadi negara industri maju (Eikman 2015).

Tidak dapat dipungkiri bahwa industri otomotif atau otomobil merupakan salah satu industri strategis yang memberikan kontribusi cukup besar bagi proses perkembangan ekonomi global. Industri ini pun terkait dengan industri lainnya sehingga Peter Dicken seorang pakar *economic geographer* menyebutnya sebagai '*The Key Manufacturing Industry*'. Industri otomobil ini mampu memproduksi sekitar 60 juta kendaraan dalam satu tahun dan menyumbang hampir separuh dari keseluruhan konsumsi minyak dunia. Menurut *Korean Automobile Manufacturers Association* pada laporan tahunannya, industri otomobil berada pada peringkat pertama dari segi penyerapan tenaga kerja, produksi dan nilai tambah jika dibandingkan dengan industri manufaktur lain di Korea Selatan.

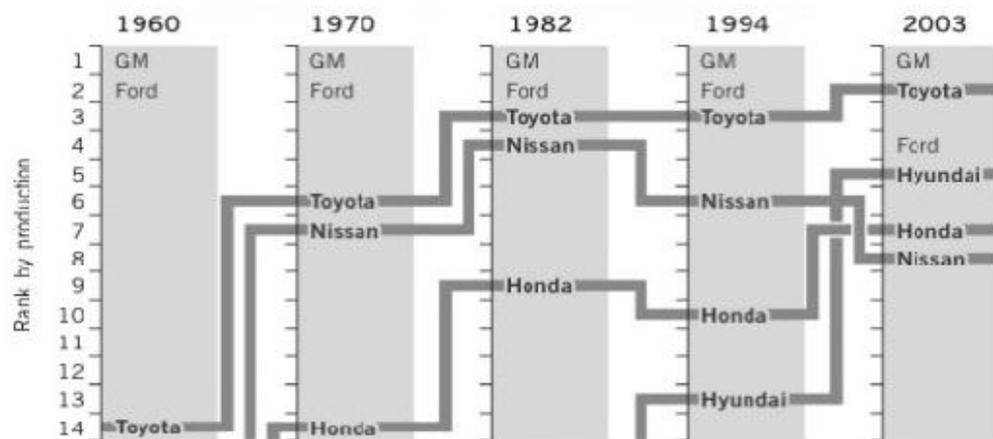
Melalui beberapa kerjasama teknik atau *joint venture* dengan perusahaan asing khususnya dari Jepang, beberapa perusahaan perakitan mobil dalam negeri pun mulai lahir. Beberapa diantaranya, Saenara Motor Company yang berkerjasama dengan Nissan, Shinjin Motor Company dengan Toyota, Kia Motor, Asia Motor, Hadonghwan Motor dan Hyundai Motor yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi konglomerasi bisnis yang biasa disebut sebagai *chaebol*.

Pada tahun 1974 industri otomobil dalam negeri sudah mulai beroperasi. Kia Motor sudah mulai memproduksi mobil pertamanya, begitu juga dengan Hyundai. Tak memakan waktu yang lama, dalam kurun waktu 5 tahun industri otomobil Korea Selatan mengalami peningkatan produksi sebanyak 10 kali lipat dari tahun 1974 hingga 1979. Bahkan pada tahun 1985, Hyundai telah mendirikan pabrik pertamanya di Canada dan memiliki kapasitas produksi sebanyak 100 ribu unit per tahun. Kesuksesan Hyundai menjadikan industri otomobil Korea Selatan sebagai eksportir mobil terbesar di antara negara-negara berkembang yang sebelumnya sekitar tahun 1970an didominasi oleh negara-negara Amerika Latin seperti Brazil, Meksiko dan Argentina (Eikman 2015).

Pada tahun 1995, Korea Selatan bahkan berhasil menjadi pelaku industri otomobil dengan kapasitas produksi terbesar kelima di dunia, berada di bawah negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman dan Prancis. Pada tahun 2003, Hyundai juga berhasil masuk ke dalam jajaran

lima besar produsen otomotif dunia berdasarkan tingkat produksi (Eikman 2015).

Tabel 4.4
Perusahaan Otomotif Dunia Berdasarkan Produksi (Eikman 2015)



Sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-15 di dunia, Korea Selatan memiliki kisah sukses yang cukup menarik. Termasuk dalam salah satu negara termiskin di dunia pada masa silam, kini Korea Selatan mampu meningkatkan volume dagang nya hingga mencapai US\$892 milyar pada tahun 2010, sehingga menempatkannya pada posisi negara pengekspor terbesar ke-7 di dunia. Korea Selatan juga menempati urutan ke-6 di dunia dalam hal cadangan devisa. Meski beberapa kali mengalami masa krisis, tetapi industri Korea Selatan terhitung stabil dikarenakan telah didapatnya pengakuan di arena global sebagai kuncinya.

Prestasi lainnya yang berhasil Korea Selatan raih adalah, berhasilnya Korea Selatan dalam menempati posisi negara kedua terbesar di dunia dalam hal pembuat galangan kapal. Sektor pembuat galangan kapal juga telah

menjadi industri terkemuka. Sektor pembuatan galangan kapal ini mencakup sekitar 34% dari total pesanan pembuatan galangan kapal di dunia(Layanan Informasi dan Kebudayaan Korea 2012).

Selain itu dalam hal pemilik koneksi internet tercepat di dunia berhasil diraih oleh Korea Selatan. Di Korea Selatan, rata-rata kecepatan internet bisa mencapai hingga 24,6 megabit per detik(Rizal 2016). Pengguna internet di Korea Selatan ini pun kian meningkat dengan berbagai macam kegunaan para penggunanya. Terbukti di antara tahun 2001 dan 2010, jumlah pelanggan akses internet *broadband* meningkat dari 7,81 juta menjadi 17,22. Sedangkan untuk jumlah pengguna internet juga meningkat, dari 24,38 juta menjadu 37,01 juta. Kecepatan internet ini pun dapat menjadi faktor pendukung dalam melakukan pemasaran secara global. Perputaran *E-commerce* juga menunjukkan pertumbuhan antara tahun 2001 dan 2010, dari 108,9 triliun won atau sekitar US\$84,4 milyar, menjadi 746,3 triliun won atau sekitar US\$645,5 milyar(Layanan Informasi dan Kebudayaan Korea 2012).

Jumlah tersebut bahkan telah diakui oleh dunia Internasional, karena Korea Selatan telah tercatat dalam hasil survei *Global Competitiveness Report* oleh *World Economic Forum* (WEF) menjadi negara ke-5 terbesar di dunia dalam hal jumlah pelanggan akses internet *broadband*.

Tabel 4.5

The Global Competitiveness Index in detail (2015) (Schwab 2015):

No	Indicator	Value	Rank/140
1	Availability of latest technologies	5.6	31
2	Firm-level technology absorption	5.4	27
3	FDI and technology transfer	4.5	67
4	Individuals using internet, %*	84.3	20
5	Fixed-broadband Internet subscriptions/100 pop*	38.8	5
6	Int'l Internet bandwidth, kb/s per user*	45.2	57
7	Mobile-broadband subscriptions/100 pop*	108.6	12

Belum lagi jika berbicara mengenai kemajuan telekomunikasi Korea Selatan. Masyarakat umum sudah tidak asing lagi dengan Samsung Electronic. Samsung berhasil membawa Korea Selatan sebagai negara dengan industri telepon seluler (*smartphone*) yang selalu menduduki peringkat teratas dari sisi penjualan di tingkat internasional. Samsung juga merupakan perusahaan pembuat perangkat elektronika terbesar di dunia. Samsung telah menjadi salah satu ikon Korea Selatan dengan spesialisasi pada media dan peralatan digital, semikonduktor, memori dan integrasi sistem. Samsung ini sendiri sudah dibentuk pada tahun 1938 sebagai Samsung Group. Pada tahun 1951 berubah nama menjadi Samsung Corporation. Samsung-Sanyo Electronic sendiri dibentuk pada masa pemerintahan Park Chung Hee, yaitu pada tahun 1969 (samsung.com 2017).

Kesuksesan Samsung Electronics terbukti melalui penjualan tahunan sebanyak lebih dari 400 juta perangkat seluler di seluruh dunia. Prestasi yang telah Samsung raih ini baik dalam mendukung peralatan telekomunikasi, maupun peralatan electronic dan lainnya sudah tidak perlu diragukan lagi.

Beberapa contoh prestasinya ialah Samsung Electronics berhasil memenangkan *Innovation Awards* di CES 2012 dengan 30 produknya. Bahkan peringkat Samsung naik ke nomor 7 pada laporan ‘*Best Global Brands 2014*’ oleh *Interbrand* pada tahun 2014(samsung.com 2017).

Ditambah lagi dengan peran *soft power* Korea Selatan yang juga mendukung perkembangan perindustrian di Korea Selatan. Salah satunya dengan trend dewasa ini yang biasa disebut dengan *K-Wave* atau singkatan dari *Korean Wave* dan juga dikenal dengan *Hallyu* (Kaurow 2013). Bisa disebabkan oleh rindunya masyarakat Korea Selatan dalam kebebasan berkarya mengingat pada jaman pemerintahan Park Chung Hee sangat terbatas akan hal tersebut, menyebabkan *K-Wave* ini melejit dengan sangat cepat(KBS World Radio 2015). *K-Wave* ini sendiri didefinisikan sebagai sebuah kemunculan pergerakan budaya regional dalam bidang budaya populer Asia. *K-Wave* ini pun mulai terkenal pada tahun 1990-an. Produk dari *K-Wave* ini pun beraneka ragam, seperti film, drama, dan musik. Bahkan *K-Wave* ini sendiri dapat menyumbang US\$2000,000 pada pasar distribusi untuk sebuah karya film(Kaurow 2013). Seiring berjalannya waktu pun kini *K-Wave* semakin melebarkan sayapnya dan semakin dikenal namanya, terutama pada wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur. Hal tersebut pun juga berpengaruh pada strategi perkembangan industri di Korea Selatan.

Presiden Park Chung Hee telah membuktikan bahwa membangun fondasi yang kuat pada sebuah negara sangatlah penting untuk keberlangsungan perkembangan perekonomian negara kedepannya. Sebagai contoh, FDI yang

telah ia jalankan terbukti mampu dikembangkan dan menjadi salah satu faktor pendukung berkembangnya perekonomian di Korea Selatan. Belum lagi berbagai sektor industri yang mulai berkembang pesat pada era pemerintahan Park Chung Hee yang kini juga menjadi alasan utama keberhasilan Korea Selatan.

Dewasa ini, pihak internasional pun juga telah menaruh perhatian pada perkembangan Korea Selatan. *World Economic Forum* (WEF) telah mengeluarkan hasil survei nya terhadap 140 negara yang dicakup dalam *Global Competitiveness Report* dan tercatat bahwa Korea Selatan masuk kedalam ranking yang cukup baik di dunia dalam beberapa hal. Bahkan Korea Selatan masuk dalam urutan ke 26 dalam *The Global Competitiveness Index 2015-2016 Rankings*. Walaupun tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena pada tahun 2012 Korea Selatan menempati urutan ke 19, akan tetapi WEF memaparkan bahwa Korea Selatan dapat mengambil keuntungan dari kestabilan makroekonomi(Schwab 2015).

Seperti yang telah diulas bahwa Korea Selatan masuk sebagai lima besar dalam hal jumlah pelanggan akses internet *broadband* di dunia. Selain itu dalam hal infrastruktur, Korea Selatan mendapatkan urutan ke 10 negara terbaik dalam hal kualitas infrastruktur kereta api. Korea Selatan juga mendapatkan ranking teratas dalam hal lingkungan ekonomi makroekonomi, yaitu tentang *inflation, annual % change*. Dalam hal *market size*, Korea Selatan juga mendapatkan ranking yang cukup bagus dalam indeks ukuran

pasar luar negeri (*foreign market size index*) yang menempati urutan ke-8.

Urutan ke-7 pun diraih Korea Selatan dalam hal hak cipta PCT(PCT *patents*).

Tabel 4.6

The Global Competitiveness Index in detail (Based on Global Competitiveness Report 2015-2016) (Schwab 2015):

2nd pillar: Infrastructure			
No	Indicator	Value	Rank/140
1	Quality of overall infrastructure	5.6	20
2	Quality of roads	5.6	17
3	Quality of railroad infrastructure	5.6	10
4	Quality of port infrastructure	5.2	27
5	Quality of air transport infrastructure	5.5	28
6	Available airplane seat km/week, millions*	2,446,0	19
7	Quality of electricity supply	5.7	38
8	Mobile telephone subscriptions/100 pop*	115.5	65
9	Fixed-telephone lines/100 pop*	59.5	4
3rd pillar: Macroeconomic environment			
No	Indicator	Value	Rank/140
1	Government budget balance, % GDP*	0.3	19
2	Gross national savings, % GDP*	35.1	14
3	Inflation, annual % change*	1.3	1
4	General government debt, % GDP*	35.7	52
5	Country credit rating, 0-100 (best)*	81.5	20
9th pillar: Technological readiness			
No	Indicator	Value	Rank/140
1	Availability of latest technologies	5.6	31
2	Firm-level technology absorption	5.4	27
3	FDI and technology transfer	4.5	67
4	Individuals using internet, %*	84.3	20
5	Fixed-broadband internet subscriptions/100 pop*	38.8	5
6	Int'l Internet bandwidth, kb/s per user*	45.2	57
7	Mobile-broadband subscriptions/100 pop*	108.6	12
10th pillar: Market size			
No	Indicator	Value	Rank/140
1	Domestic market size index, 1-7 (best)*	5.4	13
2	Foreign market size index. 1-7 (best)*	6.1	8
3	GDP (PPP\$ billions)*	1.778.8	13
4	Exports as a percentage of GDP*	47.9	47
12th pillar: Innovation			
No	Indicator	Value	Rank/140
1	Capacity for innovation	4.8	24
2	Quality of scientific research institutions	4.8	27

3	Company spending on R&D	4.6	21
4	University-industry collaboration in R&D	4.6	26
5	Gov't procurement of advanced tech products	3.9	24
6	Availability of scientists and engineers	4.4	40
7	PCT patents, applications/million pop*	220.7	7

Prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Korea Selatan ini juga membantu menaikkan nama Korea Selatan ini sendiri di mata dunia. Dengan bukti prestasi-prestasi yang telah diraih tersebut, dapat meningkatkan para investor untuk berinvestasi di negara ginseng tersebut dan serta meningkatkan perekonomian negara secara otomatis. Selain itu sektor-sektor lain dalam negara juga dapat terkena imbasnya. Seperti dalam dunia pendidikan, baru-baru ini pendidikan di Korea Selatan sedang naik daun dikarenakan menjadi salah satu negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Dalam survei WEF, Korea Selatan bahkan memiliki persentase terendah untuk kalangan remaja dengan ketrampilan membaca dan menghitung di bawah level 2. Bahkan posisi Korea Selatan dalam hal pendidikan kini masih berada di atas Jepang, Belanda dan Finlandia(Luxton 2016). Majunya sektor pendidikan juga dapat menjadi keuntungan bagi Korea Selatan karena telah tersedianya bibit-bibit unggul untuk dapat membantu perkembangan ekonomi negara di kemudian waktu.

Seluruh perkembangan yang didapat oleh Korea Selatan bukan hal yang mudah untuk diraih. Siapa yang dapat mengira berawal dari salah satu negara termiskin di dunia dan merupakan negara pertanian dapat menjadi negara kuasa besar ekonomi dan menjadi model bagi negara-negara berkembang di

Asia. Kepakaran Korea Selatan dalam bidang pembinaan, pembuatan kapal dan perindustrian diiktiraf oleh negara-negara maju dan negara yang sedang membangun, contohnya adalah Malaysia. Walaupun terpaksa bersaing dengan Jepang dan negara-negara lainnya, namun Korea Selatan dapat menempatkan dirinya sebagai negara yang mendapatkan perhatian seluruh benua (Seng 2006). Tak lain dan tak bukan hal tersebut juga dapat diwujudkan karena peran pemerintah sebagai motor penggerak utama, dan didukung oleh kerjasama warga negara secara bersama yang akan membuahakan perkembangan negara menuju ke arah yang lebih baik, untuk kepentingan bersama.